

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi

Lulu Atun Azizah¹, Ulfa Tuzzami², Ahmad Arif Fadilah³.

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: luluatunazizahh@gmail.com, ulfatuzzami25@gmail.com, arif.fadilah@umt.ac.id.

Abstract: In order to develop the potential of students to become human beings who believe in and fear God Almighty, have noble morals, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become democratic and responsible citizens, it is necessary to have education that is inseparable from the teachings of Pancasila as the basis for implementing education in Indonesia. Pancasila has a series of values, namely divinity, humanity, unity, democracy, and justice. These five values are a complete unity which refers to one goal. The basic values of Pancasila such as divinity, humanity, unity, democracy, and justice are universal, objective, meaning that these values can be used and recognized by other countries. As an ideology of the Indonesian nation and state, Pancasila is essentially not only a result of contemplation or thinking of a person or group of people like other ideologies in the world, but Pancasila is lifted from the values of customs, cultural values and religious values contained in the outlook on life of the Indonesian people. Pancasila has a series of values, namely divinity, humanity, unity, democracy, and justice. These five values are a complete unity which refers to one goal. The basic values of Pancasila such as divinity, humanity, unity, democracy, and justice are universal, objective, meaning that these values can be used and recognized by other countries. As an ideology of the Indonesian nation and state, Pancasila is essentially not only a result of contemplation or thinking of a person or group of people like other ideologies in the world, but Pancasila is lifted from the values of customs, cultural values and religious values contained in the outlook on life of the Indonesian people.

Key Words: Pancasila, Students, Globalization

Abstrak: Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukan adanya pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pancasila memiliki rangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang merujuk pada satu tujuan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara lain. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang seperti ideologi-ideologi lain di dunia, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya, dan nilai agama yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki rangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang mengacu pada satu tujuan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara lain. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya, dan nilai agama yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Mahasiswa, Globalisasi

Pendahuluan

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Untuk itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab. Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukannya pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sekarang ini banyak peserta didik dan generasi muda yang moralnya rusak karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka diantaranya karena dampak buruk globalisasi, teman bergaul, media elektronik yang semakin canggih, narkoba, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan generasi tua membangun bangsa Indonesia. Namun jika sebelum tiba waktu mereka untuk turut serta dalam pembangunan bangsa ini, akhlak dan moral mereka sudah rusak. Tentu tidak akan maju Negara ini jika dibangun oleh generasi yang tidak bermoral. Untuk itu perlu pembenahan-pembenahan agar generasi penerus yang mendatang memiliki akhlak dan moral yang baik. Kelangsungan hidup negara Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Pembahasan

1. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 31). Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundangan Negara, kebebasan dan hak Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan

perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

2. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang

Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang

Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak

Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

2. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang

Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak

asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 31-32).

3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 32). Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

4. Persatuan Indonesia

Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengangkat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. asasi warga Negara

harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 31-32).

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 32). Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.
2. Persatuan Indonesia
Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengangkat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
3. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 35). Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara.
4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah: 1) keadilan distributif (hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya), (2) keadilan legal (keadilan antara warga Negara terhadap negara), dan (3) keadilan komutatif (hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya).

Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa, menurut Suko Wiyono (2013, 95-96) memuat nilai-nilai/karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut:

Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia; (3) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.

1. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2) Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban.
 2. Nilai-nilai Persatuan Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Persatuan; (2) Kebersamaan; (3) Kecintaan pada bangsa; (4) Kecintaan pada tanah air; dan (5) Bhinneka Tunggal Ika.
 3. Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: terkandung di dalamnya prinsip Asasi (1) Kerakyatan; (2) Musyawarah mufakat; (3) Demokrasi; (4) Hikmat kebijaksanaan, dan (Perwakilan).
 4. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Keadilan; (2) Keadilan sosial; (3) Kesejahteraan lahir dan batin; (4) Kekeluargaan dan kegotongroyongan; (5) Etos kerja.
2. **Makna Pancasila sebagai Ideologi**

Ideologi memainkan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ubaidillah, 2000). Istilah ideologi berasal dari kata „*idea*” berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan „*logos*” berarti ilmu. Kata *idea* sendiri berasal dari bahasa Yunani „*eidos*” yang artinya bentuk. Selanjutnya ada kata „*idein*” yang artinya melihat. Maka secara

harafiah, ideologi berarti ilmu pengertian- pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, „*idea*“ disamakan artinya dengan „*cita-cita*“. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham (Kaelan, 2010: 113).

Ideologi berkaitan dengan tertib sosial, dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sistematis mengubah, mempertahankan tertib masyarakat. Suatu pemikiran mendalam, menyeluruh, menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasan- gagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembaga- lembaga politik suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara (Suparlan, 2012: 242).

Ideologi Negara dan ideologi bangsa dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang mendalam, diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dalam mempersatukan gerak langkah suatu kelompok, golongan, dan partai untuk menyatukan diri, menyerasikan diri secara berdaya guna dalam kehidupan politik, tingka laku politik, tujuan politik suatu Negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional Indonesia berdasarkan kepentingan nasional Negara.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi- ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkataan unsur- unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 30-31).

Pendidikan Pancasila pada dasarnya merupakan rumpun pendidikan kewarganegaraan yang mengkhususkan diri pada penanaman ideologi Pancasila ke dalam pribadi peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia (Margono, 2012: 1). Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi faham perseorangan, golongan, sukubangsa, dan agama. Sehingga semboyan Bhineka Tungga Ika“ diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya. Sehingga kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok menjadi nomor dua setelah adanya kepentingan nasional.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar Negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat tersebut, mengandung makna bahwa ideologi nasional tersebut sebagai cita-cita dan tujuan Negara.

Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita- cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Globalisasi

Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan- perubahan di berbagai Negara. Salah satu dampak dari perubahan- perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewapadaan nasional dan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era

Globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar kebenarannya. Dengan demikian gerak ide, pola aktivitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila (Untari, 2012: 22). Sehingga Pancasila hendaknya mampu menyaring dampak dari Globalisasi yang mampu membawa perubahan pada tatanan dunia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada Pancasila maka masyarakat Indonesia mampu mewujudkan nasionalisme Indonesia.

Tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri, karena hidup di antara pergaulan dunia.

3. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Peserta Didik di Era Globalisasi

Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat dunia khususnya pada masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukannya penumbuhan kembali Pancasila agar tetap menjadi kajian generasi muda khususnya para peserta didik, yaitu salah satunya dapat dimulai dari pendidikan yang ada di Indonesia, misalnya dari pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan, Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya, dan secara khusus pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn (Hidayatillah, 2014).

Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya, guru maupun dosen yang tulus mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun para siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang, pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara. Bukan itu saja nasionalisme juga dapat dibangun melalui karya seni seperti menciptakan lagu-lagu yang berslogan cinta tanah air, melukis, seni peran yang bertajuk semangat juang untuk negara dan karya-karya seni lainnya.

Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa (Alim, 2011 :11).

Kesimpulan

Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup

masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkatan unsur- unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri.

Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya, guru maupun dosen yang tulus mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun para siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang, pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara.

Daftar Pustaka

- Al-Hakim, Suparlan, dkk. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Alim, Muhammad, Aziiz Al. 2011. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Menumbuhkan Nasionalisme Bangsa*. Yogyakarta: STMIK “AMIKOM” Yogyakarta
- Hidayatillah, Yetti. 2014. *Urgensi Eksistensi Pancasila di Era Globasilasi (Studi Kritis Terhadap Persepsi Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep tentang Eksistensi Pancasila)*. Jurnal volume 6 nomor 2 Juni 2014.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan, & Zubaidi, Ahmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- Margono. 2012. “*Lndasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila*” dalam Margono (Ed). *Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan* Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Sri Untari. 2012. “*Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*” dalam Margono (Ed). *Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Ubaidiah, A, dkk. 2000. *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wiyono, Suko. 2013. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press*Pancasila*). Jurnal volume 6 nomor 2 Juni 2014.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Kaelan, & Zubaidi, Ahmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- Margono.2012. “*LndasandanTujuanPendidikan Pancasila*” dalam Margono (Ed). *Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*.Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Sri Untari. 2012. “*Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*” dalam Margono (Ed). *Pendidikan Pancasila Topik Aktual KenegaraandanKebangsaan*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Ubaidiah,A,dkk.2000.*Pendidikankewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wiyono, Suko. 2013. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang:UniversitasWisnuwardhanaMalangPress *Pancasila*). Jurnal volume 6 nomor 2 Juni 2014. *Pancasila*). Jurnal volume 6 nomor 2 Juni 2014